

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

#### 1. Tren Inflasi Bulanan di Kabupaten Sumbawa

Data dari *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa* menunjukkan perkembangan inflasi tahunan (Year-on-Year / y-o-y), bulanan (Month-to-Month / m-to-m), dan year-to-date (y-to-d) sepanjang 2025:

##### □ Inflasi Bulanan & Tahunan 2025

Bulan	Inflasi YoY (%)	Inflasi MoM (%)	Inflasi Y-to-D (%)
Jan 2025	0,18%	-	-
Feb 2025	0,15%	-0,39%	-0,56%
Apr 2025	1,39%	—	—
May 2025	1,81%	—	—
Jun 2025	3,02%	0,90%	2,01%
Jul 2025	3,29%	—	—
Aug 2025	2,35%	-0,89%	1,07%
Sep 2025	2,59%	0,11%	1,19%
Oct 2025	2,99%	0,57%	1,77%
Nov 2025	2,70%	0,29%	2,07%

Secara umum, inflasi tahunan di Sumbawa menunjukkan kecenderungan meningkat dari awal tahun, dengan puncak sekitar Juni-Juli, kemudian sedikit melemah di akhir 2025.

#### 2. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok & Kelompok Pengeluaran

Inflasi di Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh perubahan harga pada berbagai kelompok barang dan jasa:

##### □ Kelompok Penyumbang Inflasi Utama

- Makanan, Minuman & Tembakau
  - Kontribusi signifikan terhadap inflasi tahunan, terutama komoditas seperti ikan teri, bawang merah, daging ayam ras, jeruk dan sayuran.
- Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
  - Sering menjadi salah satu kontributor terbesar, misalnya kenaikan harga produk perawatan pribadi dan perhiasan emas.
- Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar Rumah Tangga
  - Harga sewa rumah, bahan bangunan, dan biaya pemeliharaan rumah turut memengaruhi indeks harga.
- Kelompok Lain
  - Kenaikan harga transportasi, pendidikan, kesehatan dan jasa restoran juga turut berkontribusi meskipun relatif lebih kecil pada beberapa bulan.

##### □ Komoditas yang Memicu Deflasi Sementara

- Beberapa bulan, terutama pada Agustus 2025, terjadi deflasi bulanan karena turunnya

harga beberapa komoditas seperti tomat, ikan layang, cabai rawit, atau penurunan harga jasa transportasi tertentu.

### 3. Interpretasi Perkembangan Inflasi

#### □ Karakteristik Inflasi di Sumbawa

- Inflasi relatif terkendali, umumnya berada dalam rentang target nasional ( $\pm 1,5-3,5\%$ ) pada sebagian besar bulan 2025.
- Harga kebutuhan pokok yang sensitif terhadap pasokan, terutama pangan segar, menunjukkan fluktuasi musiman yang tergantung pada produksi lokal dan distribusi.

#### □ Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK)

- Peningkatan IHK tahunan dari bulan ke bulan menunjukkan tekanan kenaikan harga secara keseluruhan, meskipun tidak tajam layaknya inflasi tinggi.

### 4. Risiko dan Tantangan ke Depan

#### □ 1. Fluktuasi Harga Pangan

- Pangan adalah komponen besar dalam konsumsi rumah tangga; fluktuasi produksi (misalnya karena cuaca) berpotensi mendorong volatilitas harga.

#### □ 2. Ketergantungan pada Faktor Eksternal

- Perubahan harga transportasi, energi, dan barang impor dapat memengaruhi biaya barang/jasa di Sumbawa, terutama yang tergantung pada pasokan dari luar daerah.

#### □ 3. Permintaan Konsumen

- Jika permintaan meningkat (misalnya karena kenaikan upah atau konsumsi liburan), tekanan inflasi bisa naik meskipun pasokan relatif stabil.

#### □ 4. Kebijakan Pemerintah

- Intervensi harga, subsidi atau kebijakan moneter/provinsi memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas harga di masa mendatang.

#### □ Kesimpulan

□ Inflasi bulanan Kabupaten Sumbawa mengalami fluktuasi sepanjang 2025, namun secara umum berada pada level yang terkendali. Harga kebutuhan pokok dan jasa utama bergerak naik, terutama pada pangan dan perawatan pribadi, dengan beberapa momen deflasi bulanan yang memperlihatkan sensitivitas pasar terhadap komoditas tertentu. Risiko ke depan masih berkaitan dengan fluktuasi pasokan pangan, efek musiman, dan kebijakan harga yang diterapkan

### 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi di Kabupaten Sumbawa menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, geografis, dan musiman. Meskipun inflasi relatif terkendali, dinamika harga—terutama pada kelompok pangan—masih menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi. Adapun tantangan utama yang dihadapi adalah sebagai berikut:

#### 1. Ketergantungan Tinggi pada Pasokan dari Luar Daerah

Kabupaten Sumbawa masih bergantung pada pasokan bahan pangan dan barang tertentu dari luar wilayah, seperti bawang merah, cabai, beras kualitas tertentu, serta barang industri dan bahan bakar. Ketergantungan ini menyebabkan:

- Harga mudah terpengaruh oleh gangguan distribusi,
- Kenaikan biaya logistik langsung berdampak pada harga konsumen,
- Rentan terhadap gejolak harga di daerah pemasok.

#### 2. Fluktuasi Produksi Pangan Akibat Faktor Musiman dan Iklim

Produksi pangan lokal, terutama komoditas hortikultura dan perikanan, sangat dipengaruhi oleh:

- Perubahan musim tanam dan panen,
  - Cuaca ekstrem (kemarau panjang atau curah hujan tinggi),
  - Gangguan hasil tangkap nelayan akibat gelombang laut.
- Kondisi ini sering memicu lonjakan harga pangan secara periodik dan sulit diprediksi.

#### 3. Keterbatasan Infrastruktur dan Efisiensi Distribusi

Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa yang luas serta keterbatasan infrastruktur transportasi di beberapa wilayah menyebabkan:

- Distribusi barang menjadi kurang efisien,
- Biaya angkut relatif tinggi,
- Perbedaan harga antarwilayah dalam satu kabupaten (disparitas harga).

#### 4. Dominasi Kelompok Pangan dalam Struktur Konsumsi

Struktur Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki bobot besar dalam pengeluaran rumah tangga. Akibatnya:

- Perubahan kecil pada harga pangan dapat berdampak signifikan terhadap inflasi,
- Pengendalian inflasi sangat sensitif terhadap stabilitas pasokan pangan.

#### 5. Keterbatasan Cadangan dan Pengolahan Pangan Lokal

Minimnya fasilitas penyimpanan (cold storage, gudang pangan) dan pengolahan hasil pertanian menyebabkan:

- Surplus produksi saat panen tidak dapat dimanfaatkan optimal,
- Harga jatuh saat panen dan melonjak tajam saat pasokan berkurang,
- Ketergantungan pada pasokan segar tanpa buffer stok yang memadai.

#### 6. Ekspektasi Inflasi dan Perilaku Pasar

Ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap kenaikan harga—misalnya menjelang hari besar keagamaan—sering mendorong:

- Percepatan kenaikan harga sebelum terjadi kelangkaan nyata,

Perilaku penahanan stok atau spekulasi harga di tingkat pedagang.

#### 7. Keterbatasan Data dan Respons Kebijakan yang Cepat

Pengendalian inflasi memerlukan data harga yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Tantangan yang masih dihadapi meliputi:

- Keterlambatan deteksi kenaikan harga komoditas tertentu,
- Terbatasnya intervensi dini pada level produksi dan distribusi,
- Koordinasi lintas sektor yang perlu terus diperkuat.

#### Kesimpulan

Tantangan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumbawa tidak hanya berasal dari faktor harga semata, tetapi juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan daerah, sistem distribusi, struktur ekonomi lokal, serta perilaku pasar. Oleh karena itu, pengendalian inflasi memerlukan pendekatan terpadu, melalui penguatan produksi lokal, perbaikan infrastruktur distribusi, peningkatan cadangan pangan, serta koordinasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan.

#### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sumbawa, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumbawa (TPID Kab. Sumbawa) berupa kegiatan melakukan pengendalian inflasi diantaranya :**
2. Bupati Sumbawa menyalurkan 20 unit gerobak senilai Rp. 6 Jt per unit dan modal usaha Rp. 1,5 Jt dari BAZNAS Kabupaten Sumbawa kepada para pelaku UMKM;
3. *Capacity Building* Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan wawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memperkuat sinergi, konsistensi, dan komunikasi antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Lembaga Keuangan Negara;
4. Operasi Pasar dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan wawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memperkuat sinergi, konsistensi, dan komunikasi antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Lembaga Keuangan Negara;
5. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan BAZNAS menyalurkan bantuan . 2,1 miliar untuk guru TPQ, imam dan marbot mesjid, tenaga pendidik, pelaku UMKM hingga masyarakat yang membutuhkan bantuan biaya berobat dan rumah layak huni;
6. Rapat Koordinasi Terbatas Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang membahas progres etape II operasionalisasi dan pengembangan KDKMP;
7. Koordinasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng alokasi bulan oktober dan november 2025;
8. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Car Free Night* (CFN) yang rutin dilaksanakan setiap sabtu malam. Pembahasan rapat meliputi terkait mekanisme parkir, unit pelayanan publik, kontribusi Bank NTB Syariah, serta solusi dari peserta rapat mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan dan meningkatkan kualitas kegiatan *Car Free Night* (CFN);
9. Dalam rangka memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah serta menindaklanjuti

perkembangan kondisi harga dan pasokan komoditas menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Natal dan Tahun Baru);

10. Rapat Koordinasi BUMN dan BUMD memperkuat sinergi untuk penanaman pohon, penyediaan bibit, gerakan pangan lokal, penggunaan tenun ikat sebagai identitas daerah, serta pemberdayaan UMKM agar terus tumbuh dan berdaya saing;
11. Dalam rangka memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah serta menindaklanjuti perkembangan kondisi harga dan pasokan komoditas menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Natal dan Tahun Baru).

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas kebijakan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Di Kabupaten Sumbawa, kebijakan pengendalian inflasi dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan fokus pada stabilisasi harga kebutuhan pokok, kelancaran distribusi, serta penguatan ketahanan pangan daerah.

##### 1.4.1. Capaian Kebijakan Pengendalian Inflasi

Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumbawa menunjukkan hasil yang cukup positif, yang tercermin dari:

- Inflasi daerah yang relatif terkendali, berada dalam rentang target inflasi nasional pada sebagian besar periode pengamatan;
- Stabilitas harga komoditas strategis, khususnya pada periode non-musiman dan di luar hari besar keagamaan;
- Meningkatnya koordinasi antarinstansi, baik antara pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMD, dan pelaku usaha.

Berbagai upaya seperti operasi pasar, pemantauan harga secara rutin, serta penguatan komunikasi kebijakan telah berkontribusi dalam menahan laju inflasi, terutama pada komoditas pangan utama.

##### 1.4.2. Implementasi Strategi Pengendalian Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi di daerah umumnya mengacu pada kerangka 4K, yaitu:

###### 1. Ketersediaan Pasokan

Upaya peningkatan produksi pangan lokal dan kerja sama antar daerah telah dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan. Namun, ketergantungan terhadap pasokan luar daerah masih cukup tinggi.

###### 2. Keterjangkauan Harga

Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah terbukti efektif dalam jangka pendek untuk menahan kenaikan harga, terutama pada komoditas beras, minyak goreng, dan gula pasir.

###### 3. Kelancaran Distribusi

Pemerintah daerah berupaya menjaga kelancaran distribusi melalui koordinasi dengan

distributor dan pengawasan jalur distribusi. Kendala geografis dan infrastruktur masih menjadi tantangan dalam menjaga efisiensi distribusi.

#### 4. Komunikasi Efektif

Penyampaian informasi harga dan kebijakan kepada masyarakat mulai ditingkatkan melalui media resmi dan forum TPID, meskipun jangkauan dan intensitas komunikasi masih perlu diperluas.

##### 1.4.3. Permasalahan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Meskipun berbagai kebijakan telah dilaksanakan, terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas pengendalian inflasi, antara lain:

- Sifat kebijakan yang masih reaktif, cenderung dilakukan setelah terjadi kenaikan harga;
- Belum optimalnya penguatan produksi dan cadangan pangan lokal sebagai langkah preventif;
- Keterbatasan data harga harian yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan cepat;

##### 1.4.4. Efektivitas dan Dampak Kebijakan

Dari sisi dampak, kebijakan pengendalian inflasi:

- Efektif dalam menahan lonjakan harga jangka pendek, khususnya pada momentum tertentu;
- Belum sepenuhnya mampu mengurangi volatilitas harga pangan secara berkelanjutan;
- Memberikan manfaat langsung bagi masyarakat berpendapatan rendah, namun memerlukan kesinambungan agar dampaknya lebih merata.

##### 1.4.5. Pembelajaran dan Ruang Perbaikan

Evaluasi pelaksanaan kebijakan menunjukkan beberapa pembelajaran penting, yaitu:

- Perlunya pergeseran pendekatan dari jangka pendek ke jangka menengah dan panjang;
- Peningkatan kapasitas kelembagaan TPID dalam analisis, perencanaan, dan monitoring inflasi;
- Optimalisasi kolaborasi dengan sektor swasta dan kelompok produsen lokal.

#### Kesimpulan

Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumbawa telah memberikan hasil yang cukup baik dalam menjaga stabilitas harga. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan strategi preventif, perbaikan sistem distribusi, serta pengembangan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan inflasi ke depan.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi serta tantangan yang dihadapi, diperlukan langkah kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah diarahkan pada penguatan aspek pencegahan, respons cepat, dan keberlanjutan.

#### 1.5.1. Penguatan Ketahanan Pangan Lokal

- Mendorong peningkatan produksi komoditas pangan strategis daerah melalui dukungan sarana produksi, pendampingan petani, dan kepastian akses pasar.
- Mengembangkan pola tanam terintegrasi dan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu.
- Memperkuat peran lumbung pangan desa dan cadangan pangan pemerintah daerah sebagai buffer stok saat terjadi gejolak harga.

#### 1.5.2. Peningkatan Efisiensi Distribusi dan Logistik

- Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi pendukung distribusi pangan, terutama menuju wilayah terpencil.
- Optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin kelancaran pasokan komoditas strategis.
- Pengawasan jalur distribusi guna mencegah praktik penimbunan dan distorsi harga.

#### 1.5.3. Stabilisasi Harga dan Perlindungan Daya Beli

- Pelaksanaan operasi pasar secara terencana dan berbasis data, terutama menjelang hari besar keagamaan dan periode rawan inflasi.
- Penguatan pasar murah dan subsidi terbatas yang tepat sasaran bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- Sinergi dengan program bantuan sosial agar kebijakan stabilisasi harga lebih berdampak langsung.

#### 1.5.4. Penguatan Sistem Pemantauan dan Data Inflasi

- Pengembangan sistem pemantauan harga harian yang terintegrasi antar OPD dan TPID.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pemantauan harga hingga tingkat kecamatan dan desa.

#### 1.5.5. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi TPID

- Peningkatan peran TPID sebagai pusat koordinasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
- Penguatan sinergi dengan instansi vertikal, perbankan, BUMD, dan pelaku usaha.

#### 1.5.6. Strategi Komunikasi Publik yang Efektif

- Penyampaian informasi harga dan kebijakan pengendalian inflasi secara rutin dan transparan kepada masyarakat.

Edukasi konsumen dan pelaku usaha untuk menekan ekspektasi inflasi yang berlebihan.

#### 1.5.7. Pendekatan Jangka Menengah dan Panjang

- Integrasi kebijakan pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD).
- Pengembangan sentra produksi dan pengolahan pangan lokal bernilai tambah.
- Peningkatan investasi sektor pertanian, perikanan, dan UMKM pangan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah.

#### Kesimpulan

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah perlu diarahkan pada upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah. Dengan implementasi kebijakan yang terkoordinasi, berbasis data, dan berorientasi pada ketahanan pangan lokal, stabilitas harga di daerah diharapkan dapat terjaga secara konsisten.